

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

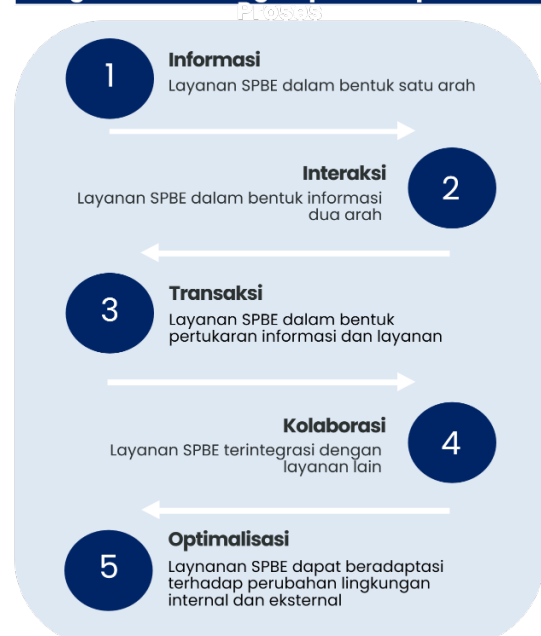
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

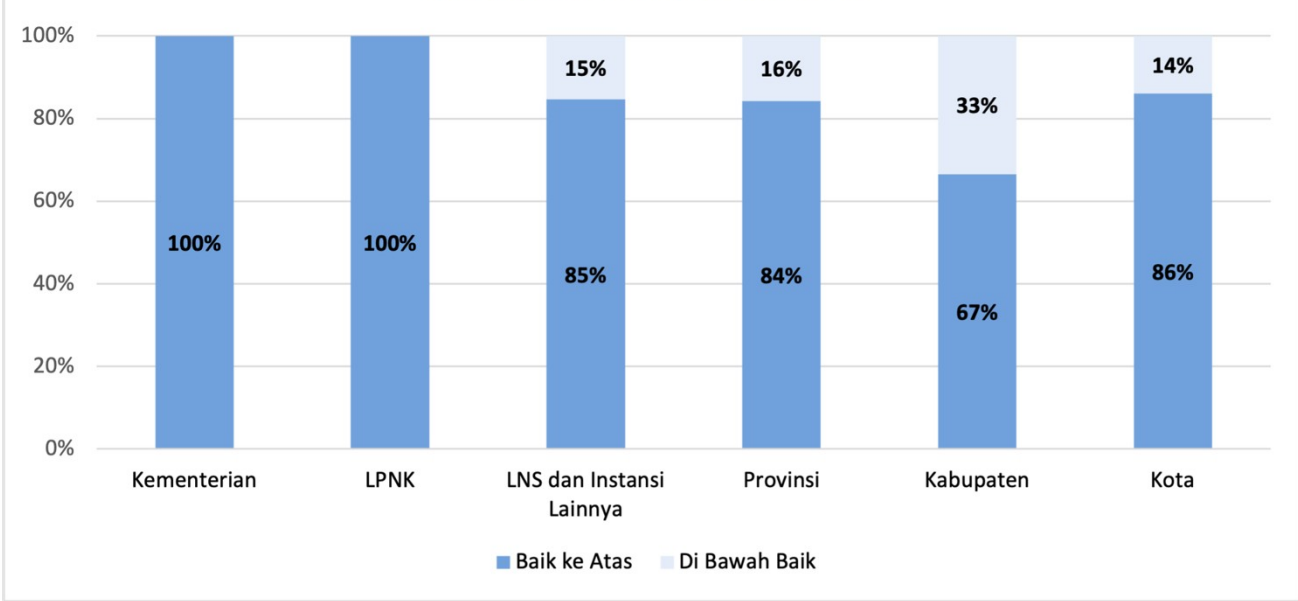


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

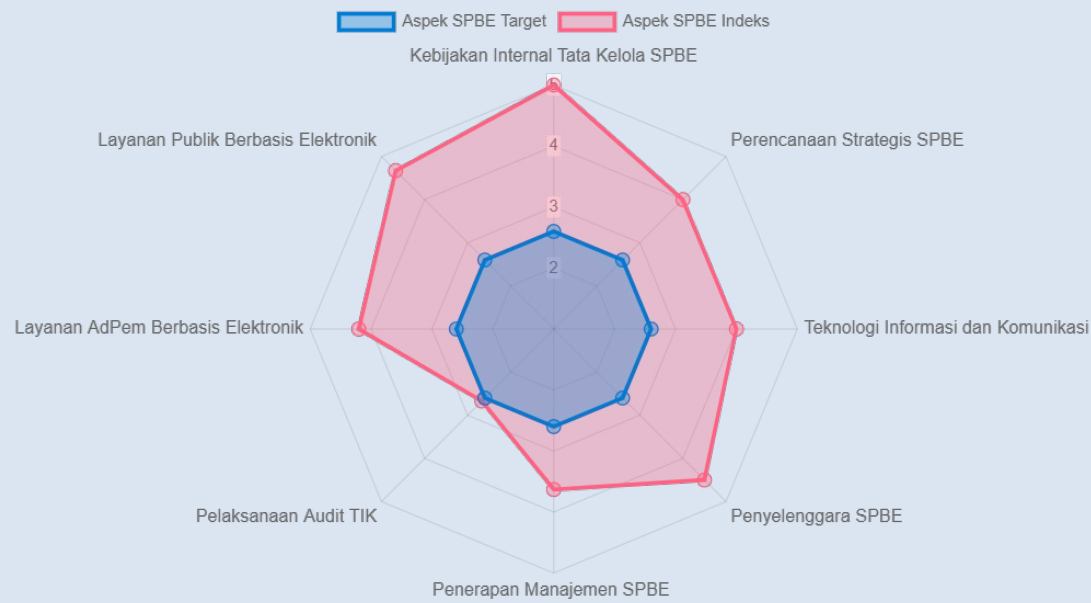
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	4,23
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	4,10
Perencanaan Strategis SPBE	4,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,00
Penyelenggara SPBE	4,50
Domain Manajemen SPBE	3,36
Penerapan Manajemen SPBE	3,63
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	4,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi dengan sempurna oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa setiap kebijakan tersebut telah melalui proses yang teliti untuk mencakup semua yang harus diatur, lalu dengan rutin dilakukan reviu dan evaluasi dan ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan baru yang komprehensif dan akomodatif dengan ketentuan dan keperluan.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Setiap kebijakan telah memuat secara lengkap hal-hal yang perlu diatur, dan telah mengatur terkait integrasi SPBE antar Instansi, dan hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa dua aspek perencanaan strategis SPBE telah melalui proses dengan disiplin dengan menetapkan standar arsitektur SPBE nasional

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan strategis SPBE ini dapat terlihat indikator arsitektur dan muatan peta rencana sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Arsitektur sudah sejalan dengan arsitektur SPBE nasional dan muatan peta rencana sudah lengkap dan sudah ditindaklanjuti untuk setiap hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan. Sementara untuk fungsi perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis belum bisa menjadi kekuatan, karena masih perlu ditingkatkan proses berkelanjutan reviu dan evaluasinya agar dapat lebih adaptif menghadapi perubahan yang ada.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek perencanaan strategis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek TIK sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Khususnya aspek Pembangunan Aplikasi SPBE telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh Pemkab Pesisir Selatan yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK dan telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan, sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin. Untuk Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional, namun belum ditemukan data dukung tindak lanjut dari reviu yang telah dilakukan. Layanan Jaringan Intra sudah direviu berkala dan sistem penghubung layanan telah diterapkan di seluruh unit kerja dan terdapat interkoneksi dengan Jaringan Intra/sistem penghubung layanan instansi lain. Namun untuk sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemkab Pesisir Selatan belum ditemukan data dukung yang menjelaskan reviu dan evaluasi yang terus dilakukan.

- **Kekuatan**
Pada aspek Teknologi Informasi dan komunikasi ini dapat terlihat indikator pembangunan aplikasi, layanan pusat data dan layanan jaringan intra sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Setiap layanannya sudah direviu dan dievaluasi dengan rutin dan telah terdapat interkoneksi antar instansi, khusus aspek pembangunan aplikasi, hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan telah ditindaklanjuti dengan pengembangan yang semakin memperluas kapabilitas pelayanan TIK.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan komunikasi.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Penyelenggara SPBE sudah dipenuhi dengan sempurna oleh Pemkab Pesisir Selatan. Data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas

bahwa setiap program kerja Tim Koordinasi SPBE di Pemkab Pesisir Selatan telah dikoordinasikan kepada semua unit kerja, namun reviu dan evaluasi yang sudah dilakukan belum ditindaklanjuti. Sedangkan aktivitas Kolaborasi antar unit kerja dan masyarakat luas dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja. Dan sudah terlihat secara rutin dilakukan reviu dan evaluasi serta sudah ditindaklanjuti, dengan perbaikan kualitas pelaksanaan kolaborasi.

- **Kekuatan**
Pada aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Selain program kerja tim koordinasi SPBE yang terus dievaluasi, aktivitas kolaborasi pun diperluas dengan memanfaatkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset Tahun 2024.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek penyelenggara SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa proses: - Manajemen Risiko SPBE, manajemen Keamanan Informasi, manajemen Aset TIK dan manajemen Data ditetapkan oleh tim-tim yang spesifik tugasnya, dan telah diterapkan ke seluruh unit kerja. Untuk manajemen keamanan informasi dan aset TIK bahkan sudah menindaklanjuti reviu yang dilakukan secara periodik. - Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dan telah memenuhi kebutuhan kompetensi. telah direviu dan ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen. - Manajemen Pengetahuan SPBE dan manajemen layanan telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen namun belum ditindaklanjuti dengan perbaikan manajemen. - Manajemen Perubahan SPBE sudah ada namun masih perlu ditingkatkan.

- **Kekuatan**
Pada aspek Manajemen SPBE ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Hanya manajemen Pengetahuan SPBE yang belum ada tindak lanjut, namun telah melalui proses reviu dan evaluasi secara periodik.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan masih memiliki kelemahan pada aspek penerapan Manajemen perubahan SPBE, yaitu belum dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, masih sporadis di masing-masing OPD.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada aspek audit TIK sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa pelaksanaan audit SPBE dilakukan dengan pedoman masing-masing: audit infrastruktur menggunakan tools BRIN, audit aplikasi dan audit keamanan dilakukan oleh auditor internal dengan melaksanakan Pemeriksaan Keamanan Aplikasi menggunakan Aplikasi WAZUH. Meskipun telah dilakukan, proses audit infrastruktur belum ada tindak lanjutnya. Semua audit dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, dengan melibatkan auditor internal sesuai bidangnya.

- **Kekuatan**
Pada aspek audit TIK ini dapat terlihat kesemua indikator belum bisa menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan, karena audit keamanan sudah menggunakan auditor internal berbantuan aplikasi, sementara dua yang lain, yaitu audit infrastruktur dan audit aplikasi, baru menggunakan tools dari instansi BRIN dan auditor internal.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa semua layanan pemerintahan Berbasis elektronik di Pemkab Pesisir Selatan telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain. Untuk Layanan Kepegawaian cukup aktif menggunakan Aplikasi Internal (SIMPEG), Aplikasi SIASN, dan Aplikasi MyASN dan Layanan Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi eTPP, keduanya telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan. Sedangkan layanan administrasi selain itu masih dalam posisi rutin melakukan kegiatan reviu dan evaluasi namun hasilnya belum ditindaklanjutinya.

- **Kekuatan**
Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Khususnya layanan yang telah memanfaatkan aplikasi berbasis pakai secara nasional seperti

SIPD, SPSE, SIASN, Srikandi, SIPKD dan E-Sakip. Selain itu juga ditemui beberapa layanan buatan lokal sudah stabil dilaksanakan.

- Kelemahan
Pekab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan publik berbasis elektronik sudah dipenuhi oleh Pekab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa semua layanan publik berbasis elektronik di Pekab Pesisir Selatan telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti Layanan SP4NLapor yang sudah terintegrasi secara nasional, layanan PPID yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi Sinar (Sistem Informasi Nagari), Web Perangkat Daerah, Data kependudukan dan PPID Provinsi Sumatera Barat, Layanan SINAR yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PPID, dan Layanan SIMPADEH yang sudah terintegrasi dengan SIPKD dan Layanan Perbankan. Empat layanan publik di atas, bahkan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi terhadap perubahan. Sedangkan 2 layanan lainnya, walaupun sudah terlihat berkolaborasi, misalnya Layanan Data terbuka sudah integrasi dengan aplikasi Pessel dalam Genggaman (pasisie) dan Layanan JDIH telah integrasi dengan JDIH Nasional menggunakan system API – JSON dan Aplikasi portal SPBE Pesisir Selatan, namun belum terlihat tindaklanjut dari hasil revidu rutinnya.

- Kekuatan
Pada aspek layanan publik berbasis elektronik ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pekab Pesisir Selatan. Baik aplikasi layanan publik berbagi pakai secara nasional, maupun layanan publik yang dibuat berdasarkan kearifan lokalnya. Semuanya sudah terlihat pemanfaatanya oleh masyarakat yang semakin terus meningkat.
- Kelemahan
Pekab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi semua aspek SPBE pada Pemkab Pesisir Selatan akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Pesisir Selatan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Pesisir Selatan, sudah dapat menggambarkan predikat sangat memuaskan dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Pesisir Selatan adalah terdapatnya 1 aspek penerapan SPBE yaitu Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah mendapatkan nilai yang sempurna, diikuti oleh 6 aspek yaitu aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Satu aspek lainnya yaitu aspek Pelaksanaan Audit TIK masih perlu disempurnakan. Pelaksanaan Audit TIK yang optimal akan mendorong kemajuan yang signifikan di Pemkab Pesisir Selatan dalam hal transparansi, keamanan, efisiensi, kualitas layanan, dan keputusan berbasis data. Audit yang dilakukan secara terencana dan teratur serta mendalam akan membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan TIK, mencegah risiko, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif dan modern. Dengan demikian, audit TIK bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong transformasi digital yang lebih baik dan efisien di sektor publik.

Namun di sisi lain penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan masih terdapat satu kelemahan, khususnya pada Penerapan Manajemen perubahan SPBE. Pelaksanaan manajemen perubahan yang optimal di pemerintah daerah tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan layanan publik, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan perubahan yang terkelola dengan baik, pemerintah daerah dapat menjadi lebih responsif, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, baik dalam aspek teknologi, pengelolaan sumber daya, maupun pelayanan masyarakat. Maka oleh sebab itu, Amat penting sekali bagi Pemkab Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen perubahan SPBE ini.

Untuk itu ada beberapa saran Perbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, untuk meningkatkan penerapan manajemen perubahan, membutuhkan pendekatan yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai stakeholder dan pengembangan SDM. Selanjutnya dapat didukung pula dengan peningkatan pengelolaan risiko, serta pendekatan berbasis data dan teknologi. Selain itu, untuk setiap indikator yang ada, perlu dilakukan proses revaluasi dan evaluasi secara berkala. Kemudian proses tindak lanjutnya pun harus segera dilakukan paling lambat dalam periode 1 tahun.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024